

PILKADA, POLITIK IDENTITAS DAN KEKERASAN BUDAYA

Idham^{*}), Suaib Amin Pranowo

Balai Litbang Agama Kementerian Agama Makasar, Sulawesi Selatan

^{*})email: idbodi@yahoo.com

Paper Accepted: 21 Juni 2020
Paper Reviewed: 22-29 Juni 2020
Paper Edited: 01-17 Juli 2020
Paper Approved: 28 Juli 2020

ABSTRAK

Tampaknya wacana tentang dampak positif politik identitas ini belum menjadi perhatian serius oleh berbagai kalangan. Olehnya itu, penelitian ini hadir untuk mengulas sisi lain dari politik identitas yang kerap hadir mewarnai pergolakan politik di tingkat lokal (pilkada) serta kaitannya dengan kekerasan budaya. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan kualitatif, guna menguraikan sisi yang berkaitan antara politik identitas dan kekerasan budaya. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dari sejumlah dokumen baik berupa buku, jurnal, sumber informasi lainnya yang mengulas mengenai politik identitas dan kekerasan budaya. Studi literatur dimaksudkan selain mengulas sisi negatif dari politik identitas, peneliti juga ikut mengulas sisi positifnya. Bahwasanya politik identitas itu tidaklah selamanya berbahaya. Bahkan di satu sisi bisa berdampak positif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini didasarkan pada fakta situasi sosial masyarakat di Indonesia yang plural, multikultur yang menyebabkan politik identitas mustahil hilang, khususnya dalam perhelatan politik baik di tingkat local maupun nasional. Meski pada dasarnya politik identitas adalah gerakan yang sifatnya positif dan bahkan bisa memperkuat gerakan demokrasi karena lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan, namun dalam perkembangannya mengalami pergeseran, bahkan menuai masalah saat hadir dalam konteks politik lokal, khususnya di negara-negara plural dan multikultur. Pola gerakannya lebih mengarah pada gerakan politisasi identitas yang didasari kebencian dan bertujuan untuk mempromosikan nilai yang mengutamakan kelompok sendiri, menekankan cara pandang antagonis terhadap kelompok identitas lain serta melegitimasi kekerasan.

Kata Kunci: politik identitas, pilkada, kekerasan budaya

PENDAHULUAN

Pergolakan politik di bangsa ini tampaknya tak pernah sunyi dari persoalan identitas dan kekerasan. Keduanya seolah menyatu dalam satu tarikan nafas, bahkan hampir bisa dipastikan, di mana ada kontestasi politik, persoalan identitas senantiasa hadir menyertainya. Sementara kekerasan biasanya muncul belakangan, saat pemilik identitas merasa dilecehkan. Kecaman, intimidasi, bahkan ancaman acapkali diperdengarkan serta dipertontonkan di ruang publik, dan itu dianggap sebagai bentuk pembelaan terhadap identitas mereka yang tersakiti.

Fenomena politik identitas ini punya sejarah panjang di bangsa ini, dan semakin

menemu ruang di saat Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara langsung diberlakukan. Meski sebelumnya, DPR sempat membatalkan undang-undang ini karena dinilai berpotensi melahirkan konflik komunal dan korupsi yang ditandai lahirnya keputusan bahwa Kepala Daerah harus kembali dipilih oleh DPRD.

Namun demikian, kebijakan ini menuai kecaman, bahkan protes keras dari kalangan masyarakat sipil. Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, akhirnya mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2014 tentang

Pembatalan UU yang baru disahkan oleh DPR itu, dan kembali menetapkan Undang-undang Pilkada secara langsung.

Apa yang menjadi kekhawatiran DPR tersebut, di satu sisi memang beralasan, sebab Pilkada langsung berpotensi menguatkan praktik politik identitas, apalagi pascaotonomi daerah, di mana identitas lokal kerap kali ditonjolkan dan tak jarang menjadi pembeda antara pendatang dan putra daerah atau pribumi dan non pribumi. Isu identitas ini semakin menguat dan masif seiring dengan perkembangan media informasi dan cukup terasa saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2017 lalu dan Pilpres 2019 yang baru saja digelar.

Tema politik bernuansa agama dan etnis di dua perhelatan politik tersebut tak terhindarkan, bahkan berefek secara psikologis ke tatanan masyarakat bangsa ini. Akibatnya, kecurigaan, ujaran kebencian serta aksi persekusi yang mengatasnamakan agama dan etnis turut mewarnai perhelatan politik.

Pilkada telah menjadi arena tumbuhnya kontestasi antarkekuatan sosial-politik yang tidak jarang didasarkan pada sentimen suku dan agama. Meski laporan “Tahunan Kehidupan Beragama” di Indonesia yang diterbitkan oleh CRCS pada 2015 lalu menyebutkan, bahwa jumlah kekerasan dalam pilkada yang terkait dengan konflik komunal relatif rendah. Namun perlu diwaspadai karena politik identitas di pilkada tidak berdampak langsung pada terjadi kekerasan komunal, tetapi berpotensi menciptakan antagonisme dan polarisasi di masyarakat berdasarkan sentimen komunal. Apalagi pada masyarakat heterogen yang tersegregasi berdasarkan etnik, agama dan budaya.

Demikian pula, meski sebagian kalangan berpandangan bahwasannya politik identitas berdampak buruk terhadap laju perkembangan demokrasi, namun di sisi lain, kita juga tidak bisa menafikan pandangan yang melihat sisi positif politik identitas yang diyakini bisa mendorong penguatan sistem demokrasi. Tampaknya wacana tentang dampak positif politik identitas ini belum menjadi perhatian serius oleh berbagai kalangan. Olehnya itu, penelitian ini hadir untuk mengulas sisi lain dari politik identitas yang kerap hadir mewarnai pergolakan politik di tingkat lokal (pilkada) serta kaitannya dengan kekerasan budaya.

METODE PENELITIAN

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan kualitatif, guna menguraikan sisi

yang berkaitan antara politik identitas dan kekerasan budaya. Dengan teknik pengumpulan data menggunakan studi literatur dari sejumlah dokumen baik berupa buku, jurnal, sumber informasi lainnya yang mengulas mengenai politik identitas dan kekerasan budaya.

Menurut Ridwan (2004) pengumpulan data adalah prosedur yang dirancang secara sistematis guna mendapatkan data yang diperlukan. Data-data yang diperoleh dari berbagai literatur ini kemudian oleh peneliti di analisis untuk disajikan dan kemudian peneliti menarik kesimpulan. Muhajir (1996) menyebutkan analisis data merupakan pengolahan dan penafsiran data.

Studi literatur dimaksudkan selain mengulas sisi negatif dari politik identitas, peneliti juga ikut mengulas sisi positifnya. Bahwasanya politik identitas itu tidaklah selamanya berbahaya. Bahkan di satu sisi bisa berdampak positif bagi perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini didasarkan pada fakta situasi sosial masyarakat di Indonesia yang plural, multikultur yang menyebabkan politik identitas mustahil hilang, khususnya dalam perhelatan politik baik di tingkat local maupun nasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lahirnya Politik Identitas

Wacana tentang politik identitas oleh kalangan ilmuwan sosial mulai menjadi fokus kajian pada tahun 1970-an di Amerika Serikat. Perhatian soal politik identitas ini bermula saat kelompok minoritas, gender, feminisme, ras, etnisitas dan kelompok-kelompok sosial lainnya merasa terpinggirkan dan teraniaya. Meski nama pencetus istilah politik identitas hingga saat ini masih kabur, namun substansi yang mendasari kajian dan gerakan politik identitas ini adalah keadilan.

Isu keadilan tentu saja menjadi sesuatu yang sangat relevan untuk membangun kesadaran kelompok-kelompok yang merasa tertindas itu. Di Amerika Serikat, dominasi ketidakadilan ini terkait dengan persoalan ras, di mana kalangan kulit hitam, masyarakat Spanyol dan etnis-etnis lainnya merasa terpinggirkan oleh roda kapitalisme yang umumnya dikuasai oleh golongan kulit putih.

Fenomena perjuangan ras ini, tampak menjadi wacana populer di Amerika Serikat. Muhammad Ali, salah seorang petinju kelas berat dunia yang pernah tenar pada tahun 1970-an, juga tercatat pernah terlibat dalam perjuangan ini. Bahkan dia pernah mendapat

hukuman karena berani melawan kebijakan pemerintah Amerika Serikat yang saat memberlakukan wajib militer bagi warganya. Muhammad Ali melawan kebijakan itu dengan menolak bergabung ke militer untuk berperang melawan Vietnam. “*Aku tak sudi terbang ribuan kilometer hanya untuk membunuh orang-orang lemah demi meneruskan perbudakan oleh orang kulit putih,*” demikian katanya saat ditanya alasan menolak bergabung dengan militer.

Di masa Ali, orang-orang kulit hitam tidak punya hak di ruang publik. Mereka tidak boleh makan bersama orang kulit putih di restoran, mereka pun dilarang duduk di depan saat berada di bus dan warga kulit hitam harus duduk di belakang. Tempat duduk bagian depan hanya untuk kalangan kulit putih. Belum lagi stigma miring yang kerap dituduhkan kepada mereka, masa itu adalah masa yang suram untuk masyarakat kulit hitam.

Meski pada dasarnya politik identitas lahir dari proses perlawanan terhadap ketidakadilan, namun dalam perkembangannya, cakupannya menjadi luas, dan merambah ke persoalan agama, kepercayaan serta ikatan-ikatan kultural yang beragam. Sementara di Indonesia, politik identitas lebih terkait dengan masalah etnisitas, agama, ideologi dan kepentingan-kepentingan lokal yang diwakili pada umumnya oleh para elite dengan artikulasinya masing-masing.

Undang-undang Otonomi Daerah sebagaimana yang disebutkan di atas menjadi keran bagi terbukanya gerakan politik identitas. Wacana keadilan dan pemerataan pembangunan menjadi ciri utama gerakan ini. Semakin menguat di saat pragmatisme politik dan marginalisasi kelompok masyarakat lokal menyatu dan menjadi pendorong kuat lahirnya politik dan perjuangan identitas di tingkat lokal. Tak hanya itu, politik identitas juga kian menemukan ruang disaat kepentingan kekuasaan, pengaruh globalisasi dan *superpower* identitas merambah ke tingkat lokal.

Hal ini semakin memperjelas bahwasanya masa transisi dari orde baru ke reformasi ternyata tidak selamanya berdampak positif terhadap dinamika perpolitikan bangsa ini. Bahkan politik lokal yang menunjukkan warna etnis boleh dibilang marak setelah Orde Baru (Soeharto) tumbang. Salah satunya adalah corak politik lokal di Kalimantan Barat menunjukkan warna etnis yang sangat mencolok sejak berakhirnya pemerintahan Orde Baru. Bahkan tak jarang diwarnai pergerakan massa yang berujung pada lahirnya konflik dan kekerasan antarasuku (Dayak dan Melayu) seperti yang terjadi tahun 1997 dan 1999. Konflik tersebut

dilatari soal pengangkatan pejabat untuk posisi strategis.

Fenomena yang sama juga terjadi di beberapa daerah, di mana kekuatan-kekuatan politik didominasi oleh elite-elite lokal, bahkan jaringan mereka (orang kuat lokal) di beberapa daerah seperti Banten, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan bukan hanya berada di bawah kekuasaan bos ekonomi, tetapi juga di bawah kepemimpinan bangsawan lokal, pemuka agama dan tokoh adat. Kelompok ini, tak hanya dengan mudah menggerakkan masyarakat awam sesuai dengan perintahnya, tapi juga sangat mungkin memanipulasi sentimen etnik, agama dan adat guna menggelorakan emosi masyarakat umum di daerah. Apalagi yang mengobarkan adalah bangsawan lokal, pemuka agama, berikut tokoh adat yang selama rezim Orde Baru berkuasa mereka dimarjinalkan.

Fenomena ini bisa dilihat ketika terjadi perseteruan Kristen dan Muslim di Ambon dan tempat-tempat lain di Maluku. Kompetisi kekuasaan di Kesultanan Ternate dan Tidore juga dilaporkan telah memunculkan friksi politik yang tajam di aras lokal Maluku Utara, sekaligus juga menyulut kekerasan antaragama. Persaingan etnis di Kalimantan Tengah yang perlahan-lahan berkembang menjadi pertentangan dalam arena pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, hingga perseteruan antarelite dalam rangka pembentukan daerah otonom baru melalui kebijakan *redistricting*.

Sementara kehadiran globalisasi juga menjadi salah satu penyebab menguatnya identitas di tingkat lokal adalah efek dari globalisasi. Globalisasi bergerak tidak lagi melalui Negara, tapi juga sudah merambah ke daerah-daerah. Globalisasi dan modernisasi juga telah menjadi media transformasi sosial dan budaya, mengubah perilaku keagamaan masyarakat, khususnya masyarakat perkotaan secara dramatis hingga terguncangnya identitas keagamaan mereka. Pada konteks ini, identitas keagamaan tak jarang dijadikan sebagai term politik, yang oleh sebagian kalangan dianggap berbahaya karena berpotensi merusak tatanan kohesi sosial bangsa.

Pilkada dan Politisasi Identitas

Sejak diberlakukannya pemilihan kepala daerah secara langsung, isu etnisitas pun turut mewarnai pergulatan politik di daerah. Etnis tak hanya menjadi penanda pembeda identitas biologis dan kebudayaan semata, tapi juga menjadi penanda identitas politik, di mana kesamaan ras dan identitas budaya dikuatkan. Hal ini tak bisa juga dilepaskan dari kondisi

sosial masyarakat lokal yang sangat kuat dipengaruhi oleh sistem primordial etnis, sehingga ia pun menjadi daya tawar dalam arena politik dan birokrasi pemerintahan.

Fakta dari fenomena ini dapat disaksikan pada saat pilkada Sulawesi Selatan tahun 2013 lalu. *Black Campaign*, “perang” baliho antarcalon dengan menggunakan idiom khas etnik tertentu dengan percaya diri memajang baliho dengan memajang terminologi khas Makassar. Begitupun di beberapa daerah atau kabupaten ada yang menggunakan idiom Bugis. Bahkan sejarah kelam masa lalu (baca; masa kerajaan) di mana perang antarkerajaan yang kebetulan berbeda etnis tak jarang dihadirkan kembali untuk menguatkan ikatan solidaritas politik.

Selain dua hal tersebut, terdapat juga kandidat yang melepaskan diri dari simbol etnik, dan lebih memilih memasang simbol agama. Isu seperti ini yang menjadi jualan cukup laris dan turut mewarnai perhelatan pilkada di beberapa daerah. Sehingga tidak mengherankan jika perhelatan politik di tingkat lokal, beberapa tahun terakhir tak hanya kental dengan isu-isu primordial dan sektarianisme, tapi juga isu agama.

Penggunaan kata kafir dan *munafiq*, meski sudah berabad-abad diwacanakan dalam kajian keagamaan, tampak tetap aktual, tak terkecuali dalam dunia politik. Stigma kafir dan *munafiq* ini kerap dialamatkan kepada mereka yang berbeda pilihan. Bahkan yang paling menyedihkan dan boleh dibilang sejarah baru dari dampak perpolitikan di Indonesia, yaitu munculnya sekelompok orang yang tidak bersedia menyolati jenazah orang-orang yang berbeda pilihan politik dengan mereka. Akibatnya, pilkada pun rentan akan diskriminasi dan konflik.

Dampak lain perpolitikan di bangsa ini adalah menguatnya sentimen rasisme yang belakangan menjadi gerakan populis, bahkan semakin menguat saat isu komunisme dan penistaan agama menjadi pemersatu warga. Tentu saja ini menjadi keprihatinan yang luar biasa, apalagi terjadi di tengah mudarnya nilai-nilai kearifan lokal, tergantikan oleh nilai-nilai baru yang lebih cenderung sektarian dan eksklusif. Sementara, tokoh agama, masyarakat dan aktivis lembaga swadaya masyarakat sudah mulai kehilangan kepercayaan di masyarakat. Selain itu, saat pilkada, umumnya warga sibuk membicarakan politik hingga tak ada ruang-ruang sedikit pun membicarakan pentingnya membangun kerukunan bangsa. Belum lagi adanya sebagian warga yang belum bisa

menerima keberadaan etnis lain di luar etnis mereka.

Fenomena sentimen komunal ini semakin tebal karena adanya identifikasi satu etnis dengan agama tertentu dan tertentu saja hal ini mengkhawatirkan, karena perilaku seperti ini berpotensi menjadi pemicu terjadi perang sipil, seperti yang terjadi di Sambas dan Ambon. Dari fenomena ini kita dapat melihat dengan jelas bahwasanya etnis dan agama telah menjadi bagian dari identitas politik. Ia menjadi sumber kekuatan sosial, budaya, politik dari berbagai kelompok yang berkepentingan dalam pilkada. Pembentukan aliansi politik berdasarkan kesamaan identitas, nilai, atau latar belakang adalah konsekuensi tidak bisa dihindarkan dalam sistem demokrasi yang menjamin kebebasan setiap warga.

Makanya itu, politik identitas tidak bisa sepenuhnya dihilangkan dalam sistem demokrasi. Meski John Stuart Mill berpendapat bahwa demokrasi tidak cocok, bahkan tidak akan berhasil di negara yang rakyatnya multietnik dan terbelah berdasarkan sentimen identitas. Namun Amy Gutmann menyarankan agar politik identitas tidak buru-buru dihakimi sebagai ancaman. Sebab menurut Gutmann, politik identitas bisa mempengaruhi keberhasilan demokrasi. Gutmann mengatakan, ada tiga model klasifikasi politik identitas yang bisa digunakan untuk mengukur pengaruh politik identitas terhadap keberhasilan demokrasi. Ketiga model tersebut adalah, *good* (tidak berbahaya), *bad* (kurang berbahaya) dan *ugly* (sangat berbahaya).

Gutmann mengatakan, politik identitas bisa dianggap baik ketika berperan positif dalam demokrasi, sebab ia bisa menghadirkan nilai-nilai solidaritas, membangun kesadaran publik tentang pentingnya kewargaan, melawan ketidakadilan terhadap kelompok tertentu, selama perjuangannya tidak dengan tujuan untuk mempromosikan supremasi kelompok sendiri dan kebencian terhadap kelompok lain. Tentu hal ini berbeda dengan politik identitas yang berbahaya (*Ugly*) karena ia didasari oleh kebencian dan bertujuan untuk mempromosikan nilai yang mengutamakan kelompok sendiri, menekankan cara pandang antagonis terhadap kelompok identitas lain dan melegitimasi kekerasan.

Sementara istilah *bad*, dalam pandangan Gutmann digunakan bukan dalam pengertian bahwa politik identitas ini buruk. Politik identitas dalam kategori ini meskipun tidak secara aktif mempromosikan kesadaran publik yang positif, tetapi minimal tidak mengancam demokrasi dengan mempromosikan permusuhan

dan melegitimasi kekerasan antarkelompok identitas.

Hal yang sama dikemukakan oleh Reilly, dia mengatakan bahwa sistem demokrasi bagi masyarakat plural bukanlah untuk menghilangkan politik identitas, tapi menciptakan sistem kelembagaan yang bisa mencegah dampak negatif dari praktik politik identitas itu. Reilly meyakini bahwa demokrasi tetap bisa berhasil di negara plural asal tersedia desain politik yang dapat mencegah mobilisasi elektoral dengan menunggangi sentimen konflik sektarian. Demikian juga, dibutuhkan desain politik yang bisa mendorong pembentukan koalisi aliansi kekuatan atau aktor politik dari kelompok identitas yang beragam.

Pandangan Reilly ini, diduga berangkat dari cara pandang yang mengatakan bahwa sistem demokrasi membolehkan seseorang mengekspresikan segala keinginannya selama hal itu tidak mengganggu kepentingan orang lain. Olehnya itu, sebagai negara demokrasi yang plural dan multikultur, kontestasi yang mengharuskan hadirnya identitas di ruang publik menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Justru yang harus diantisipasi adalah menguatnya politisasi identitas, sebab cara berpolitik seperti ini tidak hanya mengaburkan nilai-nilai demokrasi, tapi juga berpotensi melahirkan konflik komunal.

Dampak Politisasi Identitas

Pada dasarnya politik identitas adalah sesuatu yang positif karena awalnya memang dipergunakan untuk memperjuangkan kepentingan kelompok yang mengalami ketertindasan dan diskriminasi. Meski demikian, kecenderungan yang terjadi di Indonesia adalah kelompok mayoritas menggunakan identitas tertentu seperti agama, suku, dan ras untuk memobilisasi massa. Ironisnya, hal itu tak jarang dilakukan oleh elite-elite politik, bahkan mereka kerap membajak demokrasi untuk kepentingan kekuasaan dengan menggunakan isu identitas. Akibatnya, hembusan isu SARA (suku, ras dan agama) di setiap perhelatan politik tak terhindarkan.

Dampak dari fenomena politisasi identitas ini cukup terasa, apalagi politik di Indonesia boleh dibilang masih labil dan banyak dipengaruhi oleh emosi dan kepentingan kelompok. Masyarakat memilih bukan karena pertimbangan rasional, tapi karena kepentingan identitas. Tentu saja ini berbahaya karena berpotensi melahirkan kekerasan budaya dengan cara menggunakan simbol agama untuk meminggirkan kelompok yang berbeda. Paling

tidak dampak dari politisasi identitas bisa dijabarkan sebagai berikut:

1. Retaknya kohesi sosial.

Secara kasat mata gerakan politisasi identitas tidak hanya berhasil membela masyarakat, tapi juga melemahkan kohesi sosial mereka. Menguatnya pragmatisme politik, ikatan-ikatan primordial berbasis agama, daerah dan asal-usul menjadi salah satu penyebab. Fenomena ini tak hanya berpotensi menyuburkan prasangka, sentimen agama dan etnis, tapi juga lahirnya konflik sektarian.

Direktur Eksekutif Reform Institute, Yudi Latif mengatakan, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab retaknya kohesi sosial, salah satunya adalah ketidakadilan. Menurutnya, pasca reformasi bergulir, Indonesia mengalami surplus kebebasan, tapi defisit keadilan, sehingga kesenjangan sosial pun makin menganga.

Fenomena ini semakin tampak di saat simbol-simbol agama dihadirkan di ranah publik guna mengalang kekuatan politik. Padahal isu ini, menurut Nasaruddin Umar sangat sensitif, ia tak hanya bisa mengalahkan isu primordialisme, kesukuan dan kedaerahan, tapi juga dampaknya sangat sulit untuk dibendung. Agama bisa diibaratkan pisau bermata dua, bisa menjadi pemersatu bangsa, sebagai yang terjadi saat perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, namun di sisi lain juga bisa menjadi pemicu lahirnya disintegrasi bangsa.

2. Pergeseran identitas.

Pandangan di atas tampak samar-samar mulai terlihat di bangsa ini. Salah satunya bisa dicermati lewat media sosial. Hujatan, makian, ancaman kekerasan serta sumpah serapah kerap kali muncul, hanya karena persoalan perbedaan ideologi dan pilihan politik. Hal ini sekaligus menandai terjadinya pergeseran cara pandang di masyarakat, di mana ikatan kesukuan tak lagi penting, karena terpenting saat ini adalah siapa yang se-ideologi dengan kita. Jika dulunya ikatan etnis dibentuk berdasarkan zona geografis, namun seiring dengan perkembangan zaman, etnisitas perlahan mengalami pergeseran. Saat ini, identitas kesukuan tak lagi dibingkai dalam zona geografis, tapi berdasarkan pada kesamaan ideologi.

Pergeseran identitas lama seperti primordialisme dan sektarianisme ke identitas baru bernama ideologi, tak hanya ditemukan dalam bentuk gaya hidup, tapi juga pada perilaku dan cara pandang keagamaan. Jika dulunya masyarakat di bangsa ini lebih cenderung memahami agama secara damai, toleran dan terbuka, namun seiring dengan masifnya gerakan ideologi transnasional, perlahan corak keberagaman tersebut mengalami pergeseran dan cenderung sensitif.

Menurut Alissa Wahid, model keberagaman sensitif ini dapat dilihat dalam bentuk penampakan diri sebagai orang yang rapuh dalam melihat kelompok lain. Hal itu terjadi karena mentalitas keminderan lebih dominan dalam memahami agamanya sendiri. Begitu pun fenomena kekerasan yang mengatasmakan identitas agama, kerap dilakukan oleh mereka yang mengaku paling beragama, tapi tidak mampu menciptakan sikap beradab dan inspiratif. Bahkan kelompok seperti ini cenderung sinis melihat peradaban bangsa lain, karena dianggap tidak sesuai dengan keinginannya.

Sementara itu, produksi kebencian dan penyebarannya pun makin massif di media sosial. Dampak sosial yang timbulkan dari penyebaran kebencian itu, selain merusak kohesi sosial, juga akan berdampak pada masa depan generasi muda. Dikhawatirkan mereka terbiasa dengan kebencian, karena tak terbiasa dengan perbedaan.

3. Kekerasan budaya.

Politisasi identitas bisa berdampak pada lahirnya eksklusifitas dan mengeklusi kelompok yang berbeda. Hal ini bisa mengeskalasi konflik jika diringi narasi kampanye yang mengarah pada stigma sosial. Menurut Johan Galtung, produk-produk budaya seperti ideologi, bahasa, agama, seni dan pengetahuan dapat digunakan untuk melegitimasi praktik kekerasan baik secara langsung (fisik) maupun secara struktural (sistem sosial). Olehnya itu, praktik kekerasan tidak selamanya dilakukan secara fisik, tapi juga bisa dalam bentuk non fisik.

Stigma sosial adalah salah satu contoh bentuk kekerasan non fisik. Meski hal ini belum tentu bisa meledak menjadi kekerasan nyata, namun berpotensi mendorong lahirnya eskalasi konflik.

Pandangan tersebut berangkat asumsi yang mengatakan bahwasanya kekerasan selalu bermula dari kebencian, sementara kebencian biasa dikonstruksi dengan menggunakan produk-produk budaya seperti ideologi, bahasa, agama, seni dan pengetahuan.

Ketiga dampak politisasi identitas di atas belakangan menjadi citra buruk bagi bangsa ini. Negara yang dulunya dikenal sangat ramah dan terbuka terhadap berbagai perbedaan, tiba-tiba saja berubah wajah menjadi garang dan muda tersulut emosi. Bahkan tak jarang sikap seperti ini berdampak ke kelompok minoritas etnis, agama dan budaya tertentu. Mereka merasa terpinggirkan di negeri sendiri dengan hadirnya berbagai stigma yang memojokkan dan memperbesar kebencian terhadap mereka. Kebencian antar kelompok yang berbeda telah menjadi persoalan krusial di bangsa ini beberapa tahun terakhir, parahnya lagi, kebencian itu tak jarang diiringi dengan tindakan kekerasan.

Biasanya fenomena kekerasan bermula dari kebencian terhadap kelompok lain kemudian berlanjut ke tindakan kekerasan, hingga pemusnahan. Wacana kebencian itu terus diproduksi dan disebarluaskan secara massif, tujuannya untuk mempengaruhi opini publik dan ikut serta mendukung kampanye kebencian terhadap kelompok tertentu. Tak hanya itu, untuk merawat kebencian agar terus berlanjut, narasinya pun kerap diwariskan dan diwacanakan secara provokatif. Tentunya saja hal ini sangat berbahaya, sebab selain kebencian dan kekerasan tidak mengenal usia dan jenis kelamin, juga sekaligus berdampak buruk terhadap mental generasi bangsa kita di masa yang akan datang.

Pada konteks inilah, negara harus hadir memperkuat dan menjaga ruang-ruang-ruang publik dengan memperkuat hukum agar tidak didominasi oleh kelompok-kelompok tertentu. Konstitusi tak hanya menjadi pilar kehidupan serta menjadi penopang kehidupan sosial masyarakat yang plural dan multikultur, tapi juga menjadi syarat utama demokrasi yang mengharuskan partisipasi warga untuk mendiskusikan hal-hal yang menjadi keprihatinan bersama dan menyelesaikannya dengan cara-cara yang adil. Sebab bagaimana pun juga kekerasan tidak bisa ditolerir. Kekerasan hanya menjadi wilayah penegak hukum, itu pun dibatasi secara ketat oleh undang-undang, termasuk HAM.

KESIMPULAN

Meski pada dasarnya politik identitas adalah gerakan yang sifatnya positif dan bahkan bisa memperkuat gerakan demokrasi karena lahir sebagai bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan, namun dalam perkembangannya mengalami pergeseran, bahkan menuai masalah saat hadir dalam konteks politik lokal, khususnya di negara-negara plural dan multikultur. Pola gerakannya lebih mengarah pada gerakan politisasi identitas yang didasari kebencian dan bertujuan untuk mempromosikan nilai yang mengutamakan kelompok sendiri, menekankan cara pandang antagonis terhadap kelompok identitas lain serta melegitimasi kekerasan.

Politisasi identitas di tingkat lokal makin menguat seiring dengan hadirnya kelompok elite yang turut serta mewacanakan superioritas identitas, semangat komunalisme, feodalisme dan isu kedaerahan dalam perhelatan politik. Fenomena ini semakin memburuk disaat pendidikan politik tidak berjalan dengan baik serta tidak berfungsinya pranata kearifan lokal masyarakat, baik dalam bentuk tradisi maupun norma-norma sosial yang secara fungsional bisa memperkuat ikatan kekeluargaan, kohesi sosial, dan menjadi pencegah terjadinya konflik sosial, baik mengatasnamakan agama, suku dan budaya. Sehingga tidak mengherankan jika setiap perhelatan politik di tingkat lokal senantiasa rentan akan diskriminasi dan kekerasan dengan cara mempolitisasi simbol-simbol identitas untuk meminggirkan kelompok-kelompok tertentu.

Pada konteks inilah, peran pemerintah dan penyelenggara pemilu sangat diharapkan untuk tanggap dan konsisten menjaga ruang-ruang publik agar tidak di dominasi oleh kelompok-kelompok tertentu yang bisa berakibat pada lahirnya diskriminasi dan kekerasan terhadap kelompok lain dengan mengatasnamakan identitas tentu. Apapun bentuknya kekerasan yang mengatasnamakan identitas kebudayaan tidak hanya menyisakan krisis kewargaan, tapi juga berpotensi mengancam disintegrasi bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino Leo dan Agus, Yusoff Mohammad, 2010, *Politik lokal di Indonesia: Dari Otokratik Ke Reformasi Politik* (Jurnal Ilmu Politik, Edisi 21).
- Ahnaf, Iqbal Mohammad, dkk, 2015. *Politik Lokal dan Konflik Keagamaan, Pilkada*

dan Struktur Kesempatan Politik dalam Konflik Keagamaan di Sampang, Bekasi, dan Kupang. Serial Laporan Kehidupan Beragama di Indonesia (Yogyakarta CRCS UGM).

- Bagir, Abidin Zainal dan Dwipayana, GN AA, 2010. *Keragaman, Kesetaraan dan Keadilan: Pluralisme Kewargaan dalam Masyarakat Demokratis dalam "Pluralisme Kewargaan, Arah Baru Politik Keragaman di Indonesia"* (Yogyakarta: CRCS UGM).
- Herlambang, Wijaya, 2019, *Kekerasan Budaya Pasca 1965, Bagaimana Orde Baru Melegitimasi Anti Komunisme Melalui Sastra dan Film*, (Tangerang Selatan, CV. Marjin Kiri).
- Maarif, Syafii Ahmad, 2012, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Indonesia*, dalam Ihsan Ali-Fauzi dan Samsu Rizal Panggabean, *Politik Identitas Dan Masa Depan Pluralisme Kita* (Jakarta: Democracy project, Yayasan Abad Demokrasi, edisi digital).
- Muhajir, Noeng. 1996. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin
- Prawono, Amin Suaib, 2015, *Sipakatau: Multikulturalisme Berbasis Kearifan Lokal di Sulawesi Selatan* dalam Mohammad Iqbal Ahnaf, dkk, *Praktik Pengelolaan Keragaman di Indonesia Kontestasi dan Koeksistensi* (Yogyakarta: CRCS UGM).
- Prawono Suaib, *Louisville, Mohamed Ali dan Segregasi Rasisme*. <https://islami.co/louisville-mohamed-ali-dan-segregasi-rasisme>. Diakses 18 Mei 2019, pukul 00:56.
- Ridwan. (2004). *Statiska untuk Lembaga dan Instansi Pemerintahan-Swasta*. Bandung: Alfabeta.
- Sulistiyono Joko, 2010, *Representasi Etnis dalam Birokrasi: Pergulatan Demokrasi di Aras Lokal* "Draf Laporan Akhir penelitian, Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian dalam Negeri Republik Indonesia (Jakarta).
- Tanasaldy Taufiq, 2009, *Politik Identitas Etnis di Kalimantan Barat* dalam Henk Schulte dan Gerry Van Klinken *Politik Lokal di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia dan KITLV).
- Wildan Muhammad, 2016, *Aksi Damai 411-212, Kesalehan Populer dan Identitas Muslim Perkotaan Indonesia* (Maarif Vol.11, No.2-Desember).
- Harian Fajar 13 Maret 2013
- Harian Kompas, 17 Oktober 2016.